

# KONSEP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Riswan Jaenudin

Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Pendidikan IPS (PIPS) terpecah menjadi dua konsep, yaitu: (1) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah dan (2) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah merupakan *penyederhanaan* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan dan terpecah menjadi dua versi yakni: (1) PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia, (2) PIPS dalam tradisi *social science* dalam bentuk mata pelajaran IPS Terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS Terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS Terpisah-pisah untuk SMU. Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi, khususnya untuk pendidikan guru IPS merupakan *penyeleksian* dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS dan direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan IPS bertujuan agar siswa mampu: menjadi warga negara yang baik, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakatnya, memiliki konsep diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan komposisi multi budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, memahami waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk membuat/ mengambil keputusan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat sehingga siswa bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup materi PIPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi secara terpadu dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran.

**Kata kunci:** Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)

## PENDAHULUAN

Selama ini terdapat sejumlah istilah yang digunakan untuk menyebut Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), antara lain: Ilmu Sosial (IS), Pendidikan Ilmu Sosial (PIS), Pengetahuan Sosial (PS), Studi Sosial (SS), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), dan Program Pendidikan IPS (Program PIPS).

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) digunakan sebagai nama mata pelajaran pada kurikulum SD/MI dan pada kurikulum SMP yang merupakan model pemisahan "*sparated curriculum*" dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, sedangkan istilah Pendidikan IPS (PIPS) digunakan oleh para pengembang di perguruan tinggi seperti sering digunakan oleh Numan Somantri (2001) mirip dengan istilah "*Social Studies*" dalam tradisi pendidikan di Amerika (Suwama, 2001: 25). Di

samping itu PIPS digunakan sebagai nama mata kuliah, nama program studi, nama jurusan, atau nama fakultas di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP/STKIP/ FKIP). Istilah Pendidikan Ilmu Sosial (PIS) (Sanusi, 1997; Hamid Hasan, 1996) mirip dengan "*Social Sciences*" dan "*Social Science Education*". Istilah PIS dikemukakan dalam rangka pengembangan kurikulum di perguruan tinggi dan program IPS di Pascasarjana. Istilah Pendidikan Ilmu Sosial mencakup pengertian IPS yang lebih luas, tidak terbatas pada kurikulum persekolahan akan tetapi meliputi program pendidikan IPS di masyarakat. Dalam kurikulum SMU dari tahun 1975 hingga kurikulum 1994, istilah IPS digunakan sebagai nama jurusan IPS yang membedakan dengan jurusan IPA dan jurusan Bahasa. Keragaman istilah yang digunakan berkaitan erat dengan adanya keragaman program pendidikan untuk



tingkatan dan jenis lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan tujuan kelembagaan untuk setiap tingkatan dan jenis pendidikan tersebut (Suwarma, 2001: 26).

Dalam tulisan ini akan dikaji tentang konseptual IPS, tujuan, dan ruang lingkungannya.

## KONSEP PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Secara konseptual pendidikan IPS di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengertian *Social Studies* yang dikemukakan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1978: 1-2), yaitu "...*The Social Studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes*". Maksudnya, bahwa *Social Studies* adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini kemudian disempurnakan menjadi "*The Social Studies comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and collages*" (Barr, Brath, dan Shermis, 1978: 2). Artinya bahwa *Social Studies* berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat, yang dalam praktek diseleksi untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) *Social studies* merupakan disiplin turunan dari ilmu-ilmu sosial, (2) Disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan/ pembelajaran, baik tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi, dan (3) Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Jika dilihat dari visi, misi, dan strateginya, *Social Studies* dikembangkan dalam tiga tradisi, yaitu "*Social Studies Taught as Citizenship Transmission, Social Studies Taught as Social Science, and Social Studies Taught as Reflective Inquiry*" (Barr, Barth, dan Shermis, 1978), selanjutnya *Social Studies* diartikan sebagai berikut:

*Social Studies is an integration of social sciences an humanities for the purposes of instruction in citizenship education. We emphasize 'integration' for social studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data of the social sciences and the insights of humanities.*

*We emphasize 'citizenship' for social studies, despite the difference in orientation, outlook, purpose, and methods of teachers, is almost universally perceived as preparation for citizenship in a democracy* (Barr, Barth, dan Shermis, 1978: 18).

Dalam pengertian tersebut tersirat dan tersurat beberapa hal, yaitu (1) *social studies* merupakan suatu sistem, (2) misi utama *social studies* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis, (3) sumber utama konten *social studies* adalah *social sciences* dan *humanities*, dan (4) dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, dan strategi pembelajaran. Jika dilihat lebih jauh, adanya variasi tiga tradisi menyiratkan bahwa dimanapun terbuka kemungkinan untuk mengembangkan *social studies* atas dasar salah satu tradisi atau kombinasi dua atau semua tradisi.

Tradisi *Social Studies Taught as Citizenship Transmission* merujuk pada suatu model pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam suatu negara. Tradisi *Social Studies Taught as Social Science* merupakan model pembelajaran sosial yang memusatkan perhatian pada upaya pengembangan karakter warganegara yang baik yang ditandai oleh kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara kerja para ilmuwan sosial. Tradisi *Social Studies Taught as Reflective Inquiry* merupakan model pembelajaran sosial yang memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warganegara yang baik dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan. Selain ketiga tradisi tersebut muncul tradisi *social studies as social critics* dan *social studies as child development*. Kedua tradisi ini sesungguhnya masih bisa diakomodasikan ke dalam tiga tradisi utama yakni *social critics* dimasukkan ke dalam *social science* dan *child development* dimasukkan ke dalam *citizenship transmission* (Winataputra, 2007: 7).

Dalam laporan National Council for Social Studies (NCSS) dirumuskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup *Social Studies* untuk jenjang pendidikan sekolah mulai dari 'Kindergarten' sampai dengan kelas XII, sebagai berikut:



*Social Studies is a basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goals from the nature of citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations, and peoples of the world; (2) draw its content primarily from history, the social sciences and in some respects from the humanities and science; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental level of learners (NCSS, 1983: 251).*

Tujuan *Social Studies* adalah sebagai berikut: *Social Studies programs have a responsibility to prepare young people to identify, understand, and work to solve problems that face our increasingly diversified nation and interdependence world. Over the past several decades, the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic values, and skills. Program that combine the acquisition of knowledge and skills with the application of democratic values to life through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these major goals be viewed as equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support (NCSS, 1983: 251).*

Pengertian dan tujuan *Social Studies* menurut NCSS (1983) menyuratkan dan menyiratkan hal-hal sebagai berikut: (1) *Social Studies* merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan, (2) tujuan utama mata pelajaran *Social Studies* adalah mengembangkan siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi, (3) konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains, (4) pembelajarannya menggunakan cara-cara yang membangkitkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan pengalaman pribadi siswa.

Dalam laporan NCSS (1989), visi, misi, dan strategi *Social Studies* (NCSS, 1983) kembali dipertegas, yakni untuk abad ke 21, *social studies curriculum* seyogyanya menitikberatkan pada: "...role of citizen in a democracy", memberikan "...consistent and cumulative learning from Kindergarten through 12 th grade", menuntut "...history and geography should provide matrix or framework for social

*studies"*, memusatkan kurikulum bukan hanya pada "major civilization and societies", mengembangkan jaringan keterkaitan ilmu sosial dengan "...humanities and the natural and physical sciences", menempatkan konten untuk tidak diperlakukan sebagai hal yang harus diterima dan diingat, menuntut penerapan proses belajar interaktif, seperti "...reading, writing, observing, debating, role-play or simulation, working with statistical data and using critical thinking skills", memanfaatkan berbagai media dan sumber, pemberian dukungan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan, dan menempatkan "essential knowledge" dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Tujuan *Social Studies* untuk abad ke 21 masih menempatkan proses pendidikan kewarganegaraan, yakni pengembangan "civic responsibility and active civic participation" sebagai salah satu esensinya. Esensi yang lainnya adalah pengembangan kemampuan sosial yang berkenaan dengan visi tentang pengalaman hidupnya, pemahaman kritis terhadap ilmu-ilmu sosial, pemahaman manusia dalam konteks persatuan dalam perbedaan, dan analisis kritis terhadap keadaan kehidupan manusia. Hal ini nampak pada tujuan *Social Studies* (NCSS, 1989) sebagai berikut:

(1) *Civic responsibility and active civic participation*, (2) *Perspective on their own life experiences so they see themselves as part of the larger human adventure in time and place*, (3) *A Critical understanding of the history, geography, economic, political, and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both their unity and diversity*, (4) *An Understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions, and values*, (5) *Critical attitudes and analytical perspectives appropriate to analysis of the human condition* ((NCSS, 1989: 6).

Selanjutnya dalam laporan NCSS (1994: 3) *Social Studies* diartikan sebagai berikut:

*Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics and natural sciences.*



*The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.*

Berdasarkan pengertian *social studies* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

(1) Program *social studies* mempunyai tujuan pokok "...the promotion of civic competence-which is the knowledge, skills, and attitudes required of students to be able to assume 'the office of citizen' (as Thomas Jefferson called it) in our democratic republic" (NCSS,1994: 3). Hal ini menegaskan kembali bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan 'civic competence' atau kemampuan sebagai warga negara yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat berperan serta dalam kehidupan demokrasi,

(2) Program *social studies* dalam dunia persekolahan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah ditandai oleh keterpaduan "...knowledge, skills, and attitudes within and across disciplines" (NCSS,1994: 3). Hal ini memberi dasar bahwa pendidikan *social studies* memiliki dua alternatif, yakni yang bersifat monodisipliner dan multidisipliner. Pada kelas-kelas rendah ditekankan pada *social studies* yang mengintegrasikan beberapa disiplin yang bertolak dari suatu tema tertentu, misalnya "time, continuity, and change" yang memungkinkan guru mengembangkan pengalaman belajar siswa yang melibatkan disiplin, sejarah, sains, dan bahasa. Pada kelas-kelas menengah dan lanjutan, program *social studies* dapat diteruskan dengan pengintegrasian secara interdisipliner (*interdisciplinary*) yang lebih luas atau dengan menempatkan suatu disiplin sebagai titik tolak, kemudian dikaitkan atau diperkaya dengan materi disiplin lainnya yang disebut lintas disiplin (*cross-disciplinary*). Hal ini dapat difahami karena fenomena dan masalah sosial dalam kenyataannya tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan monodisiplin.

(3) Program *social studies* dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam "...construct a knowledge base and attitudes draws from academic disciplines as specialized ways of viewing reality" (NCSS,1994: 4). Siswa berperan bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun

pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita.

(4) Program *social studies* mencerminkan "...the changing nature of knowledge fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity" (NCSS,1994: 5). Dengan demikian hakekat pengetahuan yang semula dilihat secara terkotak-kotak, kini harus dilihat secara terpadu yang menuntut pelibatan berbagai disiplin.

Secara esensial, pengertian *Social Studies* menurut NCSS (1994) mengandung visi, misi, dan strategi pendidikan *social studies* yang akan mewarnai pemikiran dan praksis pendidikan *social studies* di Amerika dan negara lainnya, termasuk pemikiran mengenai pendidikan IPS Indonesia pada abad ke 21 ini.

Hasil pertemuan ilmiah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (HISPIPSI) tahun 1991 di Yogyakarta dan pertemuan tahun 1993 di Ujung Pandang diperoleh dan ditegaskan adanya dua versi rumusan pengertian Pendidikan IPS (PIPS), yaitu:

Versi Pendidikan Dasar dan Menengah, "Pendidikan IPS adalah *penyederhanaan* atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan". Sementara itu Versi FPIPS dan Jurusan Pendidikan IPS, "Pendidikan IPS adalah *seleksi* dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan" (Somantri, 2001: 92).

Dari kedua versi pengertian tersebut nampak bahwa keduanya menggunakan label yang sama, yakni Pendidikan IPS (PIPS), sedangkan perbedaannya adalah penggunaan kata "penyederhanaan" dan "seleksi". Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (dunia persekolahan), PIPS merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep "*social studies simplified...*", sedangkan untuk FPIPS (pendidikan guru IPS), PIPS berupa seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Kata penyederhanaan untuk dunia persekolahan menunjukkan bahwa tingkat kesukaran bahan harus sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat peserta didik, sedangkan untuk FPIPS adalah sama dengan



tingkat kesukaran perguruan tinggi, baik untuk isi Pendidikan IPS maupun dalam metode ilmiahnya. Somantri (2001: 65) menegaskan kedudukan PIPS untuk FPIPS direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu (*synthetic discipline*) sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (PDIPS).

Pendidikan IPS merupakan suatu *synthetic disciplines* yang berusaha untuk mengorganisir dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 1996: 4-5). Hal ini menunjukkan bahwa PIPS merupakan suatu "label" untuk berbagai mata pelajaran yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dan humaniti, seperti sejarah, ekonomi, antropologi, ilmu bumi, atau salah satu bidang kajian yang diberikan dalam pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar IPS merujuk kepada label mata pelajaran, pada jenjang pendidikan menengah IPS digunakan dalam hal penjurusan bidang studi, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi (khususnya LPTK), IPS merupakan label untuk suatu mata kuliah dan label untuk suatu fakultas serta jurusan, yaitu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS khususnya di UPI), dan jurusan Pendidikan IPS (di FKIP dan di Program Pascasarjana UPI).

Sebagai salah satu bidang kajian dalam sistem pendidikan formal (sekolah), IPS diartikan sebagai Pendidikan Pengetahuan Sosial (*Social Studies*) dan IPS sebagai Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial (*Social Sciences*). Validitas kedua pendekatan ini berlaku apabila ditinjau dari tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan (Hamid, 1993; Kamarga, 1994). Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial (PIS) untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Pendidikan IPS sebagai pendidikan pengetahuan sosial (*Social Studies*) merujuk kepada organisasi materi kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa melalui pengetahuan sosial dan budaya. Fokus utama IPS adalah kajian hubungan manusia dalam masyarakat dan lingkungannya.

Kurikulum yang demikian bertujuan untuk mendidik siswa mengembangkan kemampuan berfikir, sikap, dan nilai untuk dirinya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dan budaya. Kurikulum demikian dikembangkan dan diterapkan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Oleh karena itu dalam pembelajaran PIPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan namun aplikasi dari apa yang diketahui merupakan aspek penting dari pembelajaran.

Jika pendidikan IPS diartikan sebagai *social studies*, maka hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stopsky dan Lee (1994) yang menyatakan bahwa "*The Social Studies are the social sciences and humanities simplified for pedagogical purposes*". Kemudian Banks (1985: 3) mengatakan: "*The Social Studies is the part of the elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world*".

Pendidikan IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (*Social Sciences*) biasanya dikembangkan dalam kurikulum akademik atau kurikulum disiplin ilmu. Kurikulum yang demikian akan memakai nama disiplin ilmu sebagai 'label' programnya (mata pelajaran), tujuannya sangat erat berhubungan dengan tujuan disiplin ilmu dan biasanya diterapkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan pendidikan tinggi (Kamarga, 1994, Sanusi, 1997). Berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, Calhoun (Hamid, 1996: 6) mengartikan ilmu-ilmu sosial sebagai 'studi tentang tingkah laku kelompok umat manusia (*the study of the group behavior of human being*)'. Hal ini mengandung makna bahwa semua disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku kelompok umat manusia dimasukkan dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial merupakan bidang studi yang mengkaji realitas dan masalah perilaku manusia atau masalah hubungan antar manusia. Berdasarkan pengertian pendidikan IPS sebagai *Social Sciences* maka dalam pembelajaran di sekolah berwujud nama (label) mata pelajaran atau mata kuliah. Pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi berwujud mata pelajaran atau mata kuliah seperti sejarah, ekonomi, geografi, antropologi, sosiologi, dan tata negara.



Seiring dengan era globalisasi yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang cepat dan kompleks dalam segala aspek kehidupan, maka cakupan IPS menjadi lebih luas dan bahkan lebih kompleks. Semula pendidikan IPS hanya merupakan penyederhanaan ilmu-ilmu sosial semata tetapi sekarang sudah melibatkan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang lebih luas seperti psikologi, filsafat, agama, humaniora ideologi negara, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahkan ilmu komputer. Hal ini tersirat dalam pengertian PIPS sebagai "suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan" (Somantri, 2001: 44). Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa PIPS untuk tingkat sekolah (pendidikan dasar dan menengah) merupakan PIPS yang menekankan pada: (1) tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama, (2) isi dan metode berfikir ilmunan sosial, (3) *reflective inquiry*, dan (4) PIPS yang mengambil kebaikan-kebaikan dari butir 1, 2, 3 di atas. Pengertian ini sesuai dengan visi, misi, dan strategi *Social Studies* yang dikembangkan dalam tiga tradisi, yaitu "*Social Studies Taught as Citizenship Transmission, Social Studies Taught as Social Science, and Social Studies Taught as Reflective Inquiry*" (Barr, Barth, dan Shermis, 1978). Dengan demikian dalam PIPS tidak hanya menganut pendekatan *multi disiplin* dalam kelompok ilmu-ilmu sosial tetapi sudah menjadi *transdisiplin* (Somantri, 2001). Orientasi utama PIPS adalah memberikan pengetahuan dan wawasan sosial kemasyarakatan yang berguna bagi diri dan kehidupan siswa dalam tatanan lokal, nasional, regional, dan internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia terpilah dan diarahkan menjadi dua konsep, yaitu: (1) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah dan (2) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di perguruan tinggi (Winataputra, 2007: 18).

Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah pada dasarnya merupakan *penyederhanaan* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan, sedangkan Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi, khususnya untuk pendidikan guru IPS pada dasarnya merupakan *penyeleksian* dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta

psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Untuk pembelajaran di sekolah, PIPS terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik-pedagogis, yakni: (1) PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; (2) PIPS dalam tradisi *social science* dalam bentuk mata pelajaran IPS Terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS Terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS Terpisah-pisah untuk SMU. Untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS, PIPS direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial/PDIPS (Winataputra, 2007: 18).

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas, 2002), pendidikan IPS pada jenjang pendidikan dasar, khususnya di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI) diberi label mata pelajaran *Pengetahuan Sosial*, karena yang diajarkan dalam IPS SD dan MI bukan teori-teori atau ilmu-ilmu sosial melainkan hal-hal praktis yang berguna bagi siswa dalam kehidupan dan lingkungannya. Mata pelajaran *Pengetahuan Sosial* merupakan suatu pendekatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan masyarakat, serta lingkungannya. *Pengetahuan Sosial* mempelajari aspek-aspek sosial, spiritual, emosional, dan intelektual, serta mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu dengan lainnya pada tatanan lokal, nasional, regional, dan global. Siswa mempelajari pengetahuan sosial dalam upaya belajar bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan budayanya. Siswa belajar dari masa lampau, mengkaji masa kini, dan memprediksi masa depan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mata pelajaran pengetahuan sosial di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang mengkaji kehidupan manusia dalam lingkungan sosial, alam, dan budaya. Bahan-bahan kajian dikaji secara terpadu melalui proses penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan disiplin ilmu Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi yang diorganisir secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi, Standar



Kompetensi dan Kompetensi Dasar, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

### TUJUAN PENDIDIKAN IPS

Tujuan merupakan bagian yang fundamental dan menjadi fokus dari suatu program pendidikan. Berdasarkan sumbernya, tujuan dikelompokkan ke dalam tiga sumber, yakni sumber empirik, sumber filosofi, dan sumber kajian atau *subject matter* (Zais, 1976: 301). Sumber empirik didasarkan pada apa yang diinginkan masyarakat, sumber filosofi merupakan kajian apa yang diisyaratkan untuk dicapai dalam suatu program pendidikan, dan sumber bidang kajian merupakan tujuan apa yang harus dicapai melalui bidang studi. Dalam suatu program pendidikan, sumber empirik dan filosofi merupakan tujuan akhir atau tujuan pendidikan nasional, sedangkan sumber bidang kajian merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan akhir (tujuan pendidikan nasional).

Pendidikan IPS dalam pengertian *social studies* dapat dikelompokkan sebagai sumber bidang kajian, karena Pendidikan IPS mempunyai tujuan yang memberikan ciri khas pada bidang studi. Tujuan dimaksud sebagai mana dikemukakan oleh Bank (1985: 7), yaitu: *The major goal of the social studies is to*

*prepare citizen who can make reflective decision and participate successfully in the civic life of their communities, nation, and the world. Goals has four categories contribute to this major goal: a knowledge, b. skills, c. attitudes, and d. citizen action.* Selanjutnya NCSS (1994: 3) mengemukakan: *“The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world”.*

Berdasarkan kutipan di atas menegaskan bahwa tujuan utama PIPS adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik. Menurut Schuncke (1988), tujuan PIPS didasarkan atas tiga karakteristik, yaitu: mampu berpengetahuan, mampu mengatur kehidupannya, dan mampu memelihara nilai-nilai. Oleh karena itu tujuan pengembangannya mencakup: pengetahuan (*knowing*), proses (*doing*), dan afektif (*caring*). Jarolimek (1993) mengatakan bahwa tujuan IPS mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Pengertian (*understanding*) yang berkenaan dengan pemberian latar pengetahuan dan informasi (*knowledge and information*) tentang dunia dan kehidupan, (2) Sikap dan Nilai (*attitudes and values*), “dimensi rasa” (*feeling*) yang berkenaan dengan pemberian bekal mengenai dasar-dasar etika masyarakat yang nantinya menjadi orientasi nilai dalam kehidupan dirinya, (3) Keterampilan (*skills*), khususnya yang berkenaan dengan kemampuan dan keterampilan IPS, yaitu meliputi keterampilan sosial, keterampilan belajar dan kebiasaan kerja, keterampilan bekerja kelompok, dan keterampilan intelektual.

Tujuan pendidikan IPS yang telah dikemukakan di atas bersifat universal, artinya berlaku bagi setiap siswa yang belajar IPS (*social studies*) di negara manapun. Dalam sistem pendidikan di Indonesia tentu tujuan PIPS memiliki ciri khas yang didasarkan pada sumber empirik dan sumber filosofi. Dengan kata lain rumusan tujuan PIPS di setiap negara dipengaruhi oleh adanya perbedaan dasar dan falsafah hidup, serta kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, pranata, dan nilai kemasyarakatan. Menurut Mulyono (Helly W. Max, 1989: 64-65) dan Sunarto (1997: 4) tujuan PIPS di Indonesia mencakup aspek pengetahuan dan pemahaman, aspek nilai dan sikap, dan aspek keterampilan.



### A. Aspek Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman yang dapat diperoleh melalui pembelajaran IPS, antara lain:

- (1) Pemahaman tentang sejarah kebudayaan bangsanya dan umat manusia.
- (2) Lingkungan Geografis tempat manusia hidup serta interaksi antara manusia dan lingkungan fisiknya.
- (3) Cara manusia memerintah negaranya.
- (4) Struktur kebudayaan dan cara hidup manusia di negara sendiri dan di negara-negara lain, baik yang dekat maupun yang jauh.
- (5) Cara manusia membudayakan lingkungannya untuk menjamin hidupnya dan mempertinggi kesejahteraan bangsanya.
- (6) Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*era globalisasi dan pasar bebas*) terhadap hidup manusia, terhadap peningkatan taraf hidup manusia, rekreasi, kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa, komunikasi, transport, dsb.
- (7) Pengaruh penambahan penduduk terhadap lingkungan fisik dan sumber daya alam.

### B. Aspek Nilai dan Sikap

Nilai dan Sikap yang dapat diperoleh melalui pembelajaran IPS, adalah:

- (1) Mengakui dan menghormati sikap harkat manusia.
- (2) Mengakui dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (3) Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (4) Memupuk sikap toleransi sesama umat beragama.
- (5) Menghormati perbedaan dalam adat istiadat, kebudayaan suku bangsa, dan bangsa-bangsa lain.
- (6) Bersikap positif terhadap bangsa dan negaranya, rela membangun dan mempertahankannya.
- (7) Menghormati milik orang lain dan milik negara.
- (8) Memupuk sikap terbuka bagi perubahan-perubahan di dunia dan nilai-nilai berdasarkan norma-norma yang telah dimilikinya.

### C. Aspek Keterampilan

Aspek keterampilan berupa kesanggupan untuk mewujudkan pengetahuan dan pemahamannya dalam kehidupan di masyarakat.

Keterampilan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran IPS, antara lain:

- (1) Keterampilan sosial:
  - Hidup dan bekerja bersama, menghormati hak dan pendapat orang lain, peka terhadap masalah sosial.
  - Kemampuan mengendalikan diri.
  - Sumbang saran, pikiran, dan pengalaman kepada kelompok / orang lain.
- (2) Keterampilan belajar dan bekerja baik mandiri maupun dalam kelompok.
- (3) Keterampilan intelektual:
  - Merumuskan dan mengidentifikasi masalah.
  - Menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.
  - Menganalisis dan mensintesis data.
  - Membedakan antara fakta dan opini, informasi relevan dan tidak relevan.
  - Memahami hubungan sebab akibat.
  - Menggunakan alat-alat IPS, seperti: Globe, peta, grafik, tabel, dll.
  - Menggambar peta, mengadakan observasi, wawancara, dan membuat laporan.

Berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas siswa dituntut tidak hanya mampu menguasai aspek kognitif, afektif (nilai dan sikap), dan keterampilan, tetapi yang lebih penting bagaimana mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Proses pembelajaran pendidikan IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; mulai SD, SLTP, dan SMU bertujuan agar siswa dapat memiliki berbagai kompetensi, yaitu:

- (1) Menganalisis masyarakat sebagai sistem sosial.
- (2) Memahami proses kejadian, interaksi dan saling ketergantungan antara gejala alam dan kehidupan di muka bumi dalam dimensi ruang dan waktu.
- (3) Menerapkan perilaku yang rasional dalam pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (4) Penggolongan transaksi keuangan suatu perusahaan.
- (5) Menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (6) Merekonstruksi masa lampau, memaknai masa kini, dan memprediksi masa depan.
- (7) Beradaptasi terhadap proses perkembangan dan perubahan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi.



- (8) Memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan sosial (Depdiknas, 2002: 9-10).

Khusus untuk program pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI), Pendidikan IPS yang dinamai mata pelajaran Pengetahuan Sosial berfungsi dan bertujuan:

... mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan sosial siswa untuk dapat menelaah kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa serta memahami perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini. Sedangkan tujuannya agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan sosial yang berguna bagi dirinya, mengembangkan pemahaman tentang pertumbuhan masyarakat Indonesia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang sehingga bangga sebagai bangsa Indonesia (Depdiknas, 2002: 9).

Untuk mencapai tujuan tersebut siswa SD dan MI harus menguasai berbagai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa setelah melalui proses pembelajaran Pengetahuan Sosial adalah:

- (1) Mengidentifikasi identitas diri berdasarkan pemahaman terhadap masa lalu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Menafsirkan cara hidup bermasyarakat dan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
- (3) Mengamati dan mengidentifikasi kemajemukan masyarakat Indonesia agar dapat saling menghargai.
- (4) Mengidentifikasi sumber-sumber alam Indonesia dan pemanfaatannya bagi kehidupan masa kini dan yang akan datang.
- (5) Mendeskripsikan hubungan antar manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam, serta dapat menunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
- (6) Mengidentifikasi contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan sikap terhadap perubahan yang terjadi. (Depdiknas, 2002: 10).

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi, Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pembelajaran pendidikan IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi bertujuan agar siswa mampu: menjadi warga negara yang baik, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakatnya, memiliki konsep diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan komposisi multi budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, memahami waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk membuat/ mengambil keputusan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat sehingga siswa bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Banks dan Clegg, 1985; Skeel, 1995; Depdiknas, 2002; dan Lampiran Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006).

## RUANG LINGKUP MATERI PENDIDIKAN IPS

Ruang lingkup materi dimaksudkan untuk menyatakan keluasan dan kedalaman bahan pembelajaran pendidikan IPS.

Barr dan Shermis (Skeel 1995: 16) mengatakan bahwa isi materi IPS merupakan integrasi dari *social sciences* dan *humaniora* yang pengajarannya diarahkan pada pendidikan Kewarganegaraan. Pengembangan materi Pendidikan IPS diarahkan pada tiga tradisi (*The*



*Three Social Studies Tradition*), yaitu: *Citizenship transmitters*, *Social Sciences Position*, dan *Reflective Inquires*. Somantri (1996) mengatakan bahwa ruang lingkup pengembangan materi PIPS diarahkan kepada pengertian PIPS sebagai: pendekatan kewarganegaraan, ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, dan ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

(1) *Citizenship Transmitters* (PIPS sebagai Pendidikan Kewarganegaraan)

Pendidikan IPS sebagai *citizenship transmitters* didasarkan pada pengetahuan, perilaku yang baik, dan menghormati kekuasaan, dan *transmitters* dimaksudkan kepada bagaimana memudahkan niat atau maksud siswa terhadap seperangkat nilai. PIPS berupaya menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai, serta perilaku siswa sesuai dengan nilai dan norma, serta budaya suatu bangsa. PIPS sebagai pendidikan kewarganegaraan umumnya dikembangkan berdasar-kan pendekatan interdisipliner atau transdisiplin (Somantri, 2001). Dalam pembelajaran di sekolah dikenal dengan nama mata pelajaran atau bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

(2) *Social sciences position* (PIPS sebagai ilmu-ilmu sosial)

Pendidikan IPS sebagai *social sciences position* menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial dalam rangka membentuk warga negara yang baik di masa mendatang. PIPS berupaya mengembangkan kemampuan berfikir kritis siswa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam ilmu-ilmu sosial agar mereka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. PIPS sebagai ilmu-ilmu sosial umumnya menggunakan pendekatan monodisiplin dan memakai label sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara sebagai nama mata pelajaran di sekolah.

(3) *Reflective Inquires*

Pendidikan IPS sebagai *reflective inquires* berupaya mengembangkan kemampuan siswa berfikir rasional, berfikir benar dalam mengambil keputusan, menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan faktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang penekanannya pada proses klarifikasi struktur nilai berdasarkan

pengetahuan. PIPS sebagai *reflective inquiry* dikembangkan ditingkat perguruan tinggi (LPTK) pada jurusan atau fakultas PIPS, khususnya juga pada tingkat pascasarjana diharapkan dapat menerapkan tradisi PIPS sebagai aktivitas *reflective inquiry*.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa materi pembelajaran tidak hanya berisi pengetahuan tetapi juga *learning activities* dan *learning experiences*. Karakteristik *learning experiences* diperoleh melalui *learning activities* dan *knowledge*. Karena isi materi PIPS mengandung pendidikan nilai-nilai (values), maka fungsi *learning activities* merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka menanamkan nilai-nilai tersebut sehingga hasil yang diperoleh adalah internalisasi berupa *learning experiences*. Dalam hal ini Gross (1978) mengatakan bahwa PIPS mengacu pada dua hal, yaitu: (1) penekanan pada kriteria *knowledge* dalam arti sesuatu yang harus diketahui oleh siswa, dan (2) penekanan pada kriteria *value*, dalam arti menanamkan kesadaran siswa akan nilai-nilai tersebut dan dapat mengidentifikasi nilai-nilai untuk dirinya dan untuk orang lain. Kriteria *value* ini ditanamkan melalui proses *learning activities* dan *learning experiences*.

Ruang lingkup materi pendidikan IPS di Sekolah Dasar yang diwadahi dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial merupakan integrasi bahan-bahan kajian dari ilmu-ilmu sosial dalam topik-topik yang dekat dengan lingkungan sosial siswa. Bahan-bahan kajian dilakukan secara terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. Bahan-bahan kajian tersebut tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga *learning activities* dan *learning experiences* yang dilakukan siswa dalam lingkungannya.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), urutan materi pembelajaran PIPS di Sekolah Dasar nampaknya mengacu kepada model pendekatan komunitas yang meluas (*expanding community approach*) dan urutan spiral, yaitu urutan dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, konkrit ke abstrak, dan dari yang sudah diketahui ke yang akan diketahui lebih lanjut, lingkungan yang terdekat sampai pada lingkungan yang terjauh. Menurut Depdiknas (2003: 11), urutan materi



pengetahuan sosial di SD dan MI adalah: (1) Keluarga, (2) Lingkungan Ketetangaan dan lingkungan sekolah, (3) Masyarakat setempat, (4) Indonesia, (5) Dunia.

Bagi siswa sekolah dasar, belajar akan lebih bermakna jika apa yang dipelajarinya berkaitan dengan pengalaman hidupnya, dan mereka memandang suatu objek yang ada di lingkungan kehidupannya tidak bisa difahami secara terpisah pisah tapi harus secara utuh. Menurut Kosasih (1995: 6) materi pembelajaran PIPS SD tidak bersifat "keilmuan" melainkan bersifat "pengetahuan". Ini bermakna bahwa yang diajarkan bukanlah teori-teori sosial atau ilmu-ilmu sosial melainkan hal-hal praktis yang berguna bagi diri dan kehidupannya sekarang maupun masa mendatang dalam berbagai lingkungan serta berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran IPS lebih bersifat pembekalan mengenai seni berkehidupan dalam berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu pengorganisasian materi pengetahuan sosial dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum terpadu (Depdiknas, 2003: 11). Pendekatan terpadu berarti memadukan bahan kajian sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, dan sosiologi dalam sajian materi yang akan diberikan kepada siswa. Materi pembelajaran diangkat dari kehidupan sehari-hari yang langsung dapat diamati dan dipahami siswa, serta harus disajikan secara programatis-praktis menyangkut dunia diri dan kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangan usia, kemampuan belajar, dan lingkungan kehidupannya.

## KESIMPULAN

Pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia terpilah dan diarahkan menjadi dua konsep, yaitu: (1) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah dan (2) Pendidikan IPS untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah merupakan *penyederhanaan* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan, sedangkan Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi, khususnya untuk pendidikan guru IPS merupakan *penyeleksian* dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Untuk pembelajaran di sekolah, PIPS terpilah menjadi

dua versi yakni: (1) PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; (2) PIPS dalam tradisi *social science* dalam bentuk mata pelajaran IPS Terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS Terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS Terpisah-pisah untuk SMU. Untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS, PIPS direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial/PDIPS.

Pendidikan IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi bertujuan agar siswa mampu: menjadi warga negara yang baik, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakatnya, memiliki konsep diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan komposisi multi budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, memahami waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk membuat/ mengambil keputusan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat sehingga siswa bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup materi pendidikan IPS merupakan integrasi bahan-bahan kajian dari ilmu-ilmu sosial dalam topik-topik yang dekat dengan lingkungan sosial siswa. Bahan-bahan kajian dilakukan secara terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. Bahan-bahan kajian tersebut tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga *learning activities* dan *learning experiences* yang dilakukan siswa dalam lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, Suwama. (2001). *Epistimologi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.



- Bank, James A. (1985). *Teaching Strategies For The Social Studies*. New York and London: Longman.
- Barr, R. Barth, J.L, Shermis, S.S. (1978). *The Nature of The Social Studies*. ETC Publications, California, Palm Springs.
- Depdiknas. (2003). *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/ CTL)*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan lanjutan Pertama.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah - Kebijakan Umum*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang.
- Hamid Hasan, S. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Hamid Hasan, S. (1993). *Tujuan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: JPIS, Edisi Perdana FPIPS IKIP Bandung.
- Helly Waney, M, (1989). *Wawasan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Depdikbud Ditjen Dikti Proyek Pengembangan LPTK.
- Jarolimek, J et. Al.. (1993). *Social Studies in Elementary Education*. Seven Edition. New York: Macmillan Publishing Co Ltd.
- Kosasih Djahiri, A. dan Endang (1995). *Petunjuk Guru IPS SD*. Jakarta: Depdikbud.
- Lampiran Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang *Standar Isi: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*
- NCSS (1989). *Charting A Course: Social Studies for the 21<sup>st</sup> Century*. Washington: National Commision on Social Studies in The Schools.
- NCSS. (1994). *Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence*. Washington.
- Skeel, Dorothy J. (1995). *Elementary Social Studies: Challenges for Tomorrow's World*. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Sanusi, A. (1997). *Dasar Pengembangan S2-S3 Program Studi Pendidikan IPS Program Pasca Sarjana IKIP Bandung*.
- Somantri, Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. (Editor Dedi Supriadi dan Rochmat Mulyana), Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Somantri, Nu'man. (1995). *Masalah dan Prospek Pendidikan IPS di Sekolah dan LPTK dalam Pembangunan Nasional dan Era Globalisasi*. JPIS No. 5 Januari-Juni 1995.
- Sunarto, HS. (1997). "Kurikulum Generik Pendidikan IPS Program Strata I". Makalah pada Seminar dan Saresehan Forum Komunikasi VIII Pimpinan FPIPS/JPIPS Se-Indonesia, Jakarta.
- Winataputra, Udin. S. (2007). *Dinamika Pemikiran Inovatif Dalam Khasanah Social Studies dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia*, Makalah: Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan IPS tanggal 21 November 2007 di Auditorium JICA-UPI.